

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu penopang perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti ketika Indonesia mampu menghadapi krisis ekonomi tahun 1997/1998. Perusahaan-perusahaan besar yang diharapkan mampu bertahan ketika itu, ternyata banyak yang gagal. UMKM-lah sebagai sektor ekonomi masyarakat kecil dengan skala lokal, sumber daya lokal dan proses produksi sederhana yang produknya dijual secara lokal telah mampu membuat UMKM mampu tetap bergerak di tengah terpaan krisis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa UMKM memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap krisis, yang dimungkinkan karena UMKM memiliki ciri antara lain struktur organisasi dan tenaga kerja UMKM yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar.

Selain itu, kemampuan ini juga menjadi dasar bahwa pengembangan UMKM dapat menjadi program utama dalam pembangunan perekonomian masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (2015; 7):

“Berdasarkan tingkat produktivitas dan kebutuhan untuk meningkatkan populasi usaha kecil dan menengah, maka peningkatan produktivitas usaha mikro dijadikan sebagai target pemberdayaan UMKM ke depan. Perbaikan kapasitas dan produktivitas usaha mikro dapat dilakukan melalui penguatan aset, keterampilan dan keterhubungannya dengan jaringan usaha dan pemasaran dalam satu sistem bisnis yang mapan. Peningkatan kapasitas usaha mikro juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang selanjutnya akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Peran usaha kecil dan menengah juga perlu ditingkatkan dalam memperkuat basis produksi di dalam negeri, dan partisipasi di pasar ekspor dan investasi.

Kebijakan, program dan kegiatan peningkatan daya saing UMKM ke depan juga perlu mencakup pelaksanaan amanat UU No. 20/2008 secara paripurna, yang didukung sinergi berbagai pemangku kepentingan dan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga perlu didukung pola pemberdayaan UMKM

yang terstruktur dan tersistem, sehingga isu-isu strategis yang dihadapi UMKM dapat ditangani secara efektif.”

Data statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia (2015) menunjukkan bahwa jumlah pengusaha besar hanya 0,01 persen dari total unit usaha yang ada, 99,99 persen lainnya didominasi oleh UMKM dengan rincian 98,77 persen usaha mikro, 1,13 persen usaha kecil dan 0,09 persen usaha menengah. Sebagai sektor yang mendominasi usaha masyarakat, maka UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar untuk membantu menampung warga masyarakat akan lapangan kerja yang lebih merata di pelosok nusantara; dengan demikian dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat memberikan prioritas pembangunan UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian bangsa.

Pentingnya pemberdayaan UMKM, sebagaimana dikemukakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (2015; 1), bahwa:

“Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaannya menggunakan landasan azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).”

Berdasarkan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI di atas bahwa UMKM memiliki peran yang amat penting, yakni sebagai amanat dari UUD 1945 dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang menggunakan landasan azas kekeluargaan.

Di samping itu, keberadaan UMKM diharapkan menjadi bagian integral dalam perekonomian nasional, memiliki daya saing yang berbasis IPTEK, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yaitu:

“(a) peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai wilayah di Indonesia sehingga menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri; (b) pengembangan UKM diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik; (c) koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat; dan (d) pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.”

Selain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diamanatkan juga oleh UU bahwa UMKM diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dengan membantu meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Dari data Kementerian Koperasi dan UKM RI juga dapat dilihat perkembangan jumlah UMKM di seluruh wilayah Indonesia.

Gambaran perkembangan UMKM tahun 2012-2013 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1  
Perkembangan UMKM menurut Sektor Ekonomi secara Nasional  
(Tahun 2012-2013)

INDIKATOR	TAHUN 2012		TAHUN 2013		PERKEMBANGAN	
	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)
<b>UNIT USAHA (A+B)</b>	<b>56.539.560</b>		<b>57.900.787</b>		<b>1.361.227</b>	<b>2,41</b>
<b>A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>56.534.592</b>	<b>99,99</b>	<b>57.895.721</b>	<b>99,99</b>	<b>1.361.129</b>	<b>2,41</b>
- Usaha Mikro (UMi)	55.856.176	98,79	57.189.393	98,77	1.333.217	2,39
- Usaha Kecil (UK)	629.418	1,11	654.222	1,13	24.803	3,94
- Usaha Menengah (UM)	48.997	0,09	52.106	0,09	3.110	6,35
<b>B. Usaha Besar (UB)</b>	<b>4.968</b>	<b>0,01</b>	<b>5.066</b>	<b>0,01</b>	<b>98</b>	<b>1,97</b>

Sumber: Data Kementerian Koperasi dan UKM (diolah) (2015)

Berdasarkan data pada tabel di atas, perkembangan sektor UMKM rata-rata sebesar 2,41%. Jenis usaha yang perkembangannya sangat bagus adalah sektor usaha menengah, yakni sebesar 6,35%; sedangkan, jenis usaha yang paling rendah tingkat perkembangannya adalah

sektor usaha mikro, yakni sebesar 2,39%. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, karena pada sektor usaha mikro lebih banyak melibatkan masyarakat ekonomi lemah. Sehubungan dengan hal tersebut, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mestinya sektor usaha yang perlu mendapat tingkat perkembangan yang tinggi adalah sektor usaha mikro tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas diharapkan UMKM dapat terus berkembang. Dengan berkembangnya UMKM dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Agar UMKM dapat terus berkembang, perlu keterlibatan dan mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait. Salah satu upaya dalam peningkatan perkembangan UMKM tersebut adalah peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha, yang diantaranya tumbuh melalui peningkatan pengetahuan baik melalui lembaga pendidikan maupun proses pengalaman untuk mendapatkan pengetahuan pengembangan usaha terutama melalui UMKM.

Penguasaan pengetahuan yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan. Seberapa baik perusahaan mengelola pengetahuan yang ada di dalamnya penting bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di lingkungan yang dinamis. Salah satu isu dalam pengelolaan pengetahuan perusahaan adalah adanya *knowledge gap* atau kesenjangan pengetahuan. Kesenjangan pengetahuan atau yang lazim disebut *knowledge gap* dikaitkan dengan perbedaan antara pengetahuan yang wajib dimiliki organisasi dan pengetahuan yang dimiliki organisasi karena mempekerjakan karyawan atau menjaga bentuk-bentuk lain dari sumber pengetahuan (McBriar, 2003, 30).

Selain itu, dalam aktivitas kesehariannya perusahaan perlu mengukur pencapaian kinerja dari apa yang telah mereka lakukan karenanya dilakukan proses pengukuran kinerja baik keuangan ataupun non keuangan. Pengukuran kinerja ini diperlukan perusahaan untuk mengukur pencapaian (tujuan, penggunaan sumber daya, dan sebagainya) yang sudah

dilakukan dan untuk tetap dapat bersaing di lingkungan yang dinamis dan terus berubah (Marie et al, 2014)(Harif et al, 2013; 80).

Salah satu UMKM yang menarik untuk dibahas adalah UMKM tenun yang terletak di Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan disini terdapat usaha tenun yang turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi yang bersifat unik dan perlu penerapan *knowledge management* agar usaha ini dapat terus bertahan. Selain itu menurut warga setempat, saat ini ada kecenderungan pemilik UMKM tidak lagi berupaya untuk mempertahankan usaha menenunnya, hal ini terlihat dari waktu yang dimiliki pewaris usaha untuk belajar menenun yang mulai berkurang. Menurut warga, hal ini terjadi karena warga lebih cenderung untuk memilih anaknya bersekolah daripada menenun. Disini terjadi *Knowledge Gap* lebih lanjut disingkat K-Gap antara pemilik UMKM dan penerus. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis mengambil inisitif untuk membahas bagaimana pengaruh *knowledge gap* terhadap *non-financial business performance* pada UMKM sektor tenun di Nagari Pandai Sikek dengan mengangkat judul ANALISA PENGARUH KNOWLEDGE GAP TERHADAP NON-FINANCIAL BUSINESS PERFORMANCE PADA DIMENSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MSDM) SERTA KUALITAS PRODUK DAN JASA PADA UMKM SEKTOR TENUN DI NAGARI PANDAI SIKEK.

Untuk memfokuskan analisis, maka konteks riset dilakukan pada pemilik saat ini dan penerus/calon penerus UMKM Tenun dilokasi tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut :

Bagaimana pengaruh *knowledge gap* terhadap *non-financial business performance* pada dimensi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) serta kualitas produk dan jasa di UMKM sektor tenun di Nagari Pandai Sikek?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, dengan menggunakan refensi untuk memecahkan masalah, peneliti mencoba untuk mendapatkan dan mencapai tujuan:

Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh *knowledge gap* terhadap *non-financial business performance* pada dimensi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) serta kualitas produk dan jasa pada UMKM sektor tenun di Nagari Pandai Sikek Provinsi Sumatera Barat.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha. Sebagai bahan masukan dalam penilaian serta pengembangan terhadap penerapan *knowledge gap* dan *non-financial business performance* dalam kegiatan bisnis.
2. Bagi literatur dan area penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian lanjut pada bidang *knowledge gap (K-Gap)* dan *non-financial business performance*

### 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada analisa pengaruh *knowledge gap* terhadap *non-financial business performance* pada UMKM, dengan objek penelitian yaitu UMKM sektor tenun di Nagari Pandai Sikek Provinsi Sumatera Barat.

Objek analisis diarahkan/difokuskan pada pemilik dan penerus/calon penerus UMKM di lokasi tersebut.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I        PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan ruang lingkup serta sistematika penulisan.

## **BAB II        TINJAUAN LITERATUR**

Pada bab ini akan dijelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB III       METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang mana akan dijelaskan adalah tentang desain penelitian, sampel penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

## **BAB IV        HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan lebih luas tentang temuan dan analisis *Knowledge Gap* dan *NFPI* dalam menunjang strategi bisnis oleh UMKM di Nagari Pandai Sikek

## **BAB V        PENUTUP**

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan, saran, batasan, dan implikasi penelitian dan rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya.

Bagian terakhir penelitian ini berisikan daftar pustaka dan lampiran.

